



KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 30 (tiga puluh)
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI/ke-7
Dengan : Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Hari, Tanggal : Kamis, 3 Maret 2016
Pukul : 10.40 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E, M.M.
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : Penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia, tentang:
1. Progres/perkembangan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap 10 (sepuluh) Stasiun TV Jaringan;
2. Perkembangan isu aktual terkait dengan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, beserta jajarannya.
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Judhariksawan, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.

2. Raker dan RDP Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Ketua KPI Pusat pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. TB. Hasanuddin, S.E, M.M.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo dan KPI Pusat untuk melanjutkan proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang jatuh temponya di tahun 2016, secara tepat waktu dan tepat asas serta merujuk pada kinerja selama 10 tahun, sesuai dengan tahapan dan *timeline*.
2. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo dan KPI Pusat untuk mengkaji kemungkinan pemberian izin perpanjangan sementara bagi 10 LPS dan seluruh Lembaga Penyiaran lainnya, sampai RUU Penyiaran diundangkan, dengan catatan secara operasional LPS tetap bersiaran.
3. Komisi I DPR RI meminta KPI Pusat untuk mendesak 10 stasiun TV swasta, guna meningkatkan tayangan konten lokal sehingga terwujud pelestarian Kebhinekaan Nusantara.
4. Komisi I DPR RI mendesak Kemenkominfo untuk menutup *situs online* yang mempromosikan dan mempropagandakan konten Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dan membuat regulasi untuk hal tersebut.
5. Komisi I DPR RI mendukung langkah KPI Pusat untuk memperketat pengawasan konten terkait LGBT di lembaga penyiaran, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran penayangan konten LGBT.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Jakarta, 3 Maret 2016
KETUA RAPAT,

TTD

Dr. TB. HASANUDDIN, M.M.
A-165